

# Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Terhadap Tingkat Akuntabilitas Keuangan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis

Dariana<sup>1</sup>, Jamiatul<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, Riau, Indonesia.

<sup>1</sup>[dariana.bengkalis72@gmail.com](mailto:dariana.bengkalis72@gmail.com), <sup>2</sup>[jamiatul@gmail.com](mailto:jamiatul@gmail.com)

## Abstract

*This study aims to determine the effect of presenting reports based on Government Regulation No. 71 of 2010 and accessibility to the level of accountability of financial reports at the Department of Population and Civil Registration of Bengkalis Regency. The data used in this study is primary data. This type of research is quantitative. The object of this research is an accountable financial report based on Government regulation No. 71 of 2010 at the Department of Population and Civil Registry of Bengkalis Regency. The population of this research is the office of the Office of Population and Civil Registry Bengkalis Regency as many as 30 people. The sample used is a saturated sample because all employees are directly involved with financial reports, so the number of samples is as much as the total population, namely 30 people. The data analysis technique used is data quality test, classical assumption test, multiple regression test, hypothesis test and coefficient of determination test. Testing data analysis using multiple linear regression method which is processed using SPSS. The results of this study indicate that the variable presentation of financial statements based on PP no. 71 of 2010 and Accessibility have a positive effect on the accountability of financial reports at the Department of Population and Civil Registry of Bengkalis Regency.*

**Keywords:** *Presentation of financial statements, accessibility and accountability*

## 1. Pendahuluan

Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu kebutuhan yang harus diperhatikan dalam tatanan suatu negara. Salah satu hal yang mendukung tata kelola pemerintahan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas beserta kegiatan didalamnya menjadi tanggungjawab kepada pemberi amanah dan wewenang yang meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018:20). Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan yang disajikan oleh suatu instansi pemerintah (Miftahul Reza Fauziyah, 2017:4).

Pelaporan pertanggungjawaban pemerintah terkait keberhasilan atau kegagalan pengelolaan keuangan dan

kinerja kepada masyarakat baik langsung atau diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat diketahui melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi dan website (internet) pemerintah. Aksesibilitas laporan keuangan memberikan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Penggunaan informasi keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (I Dewa Nyoman Krisna Putra Sanjaya, 2014:4). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan salah satu lembaga pemerintah daerah yang wajib menjalankan penyajian laporan keuangan yang bersifat akuntabel. Akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk menghasilkan laporan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tuntutan

mengenai akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi bagian terpenting bagi berjalannya kegiatan pemerintahan. Penelitian ini adalah pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Chairul Wahyu (2018:5). Penelitian ini menjelaskan Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Dalam penyusunan laporan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis sering ditemui ketidaksesuaian laporan keuangan yang disajikan dengan isi laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Hal tersebut dikarenakan kurangnya : pemahaman pembuat laporan tentang Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Ada ketidaksesuaian isi laporan mengakibatkan seringnya keterlambatan penyajian laporan keuangan dapat setiap periode. Keterlambatan tersebut mengakibatkan kurangnya akuntabilitas informasi yang disajikan bagi pengguna informasi yang nantinya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.

Penelitian ini mempunyai beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1). Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas laporan keuangan?
- 2), Apakah aksesibilitas berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas laporan keuangan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk menguji dan menganalisis penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas. (2) untuk menguji dan menganalisis aksesibilitas berpengaruh Terhadap tingkat akuntabilitas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh

Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Terhadap Tingkat Akuntabilitas Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu hasil dari proses akuntansi yang berguna sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan kepada pihak yang berkepentingan sehingga dapat menunjukkan kondisi Kesehatan perusahaan dan kinerja perusahaan ( Heri, 2012:2). Laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang relevan atas posisi keuangan atas semua transaksi yang dilakukan dalam suatu entitas. Penyajian informasi pada laporan keuangan akan menciptakan transparansi sehingga mendorong terwujudnya akuntabilitas (Superdi dan M Rasuli, 2017:19). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan dari laporan keuangan, antara lain :

- a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengansumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- g) Laporan keuangan dapat disusun langsung dari neraca saldo setelah dilakukan penyesuaian dengan menghasilkan tiga laporan utama, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan operasional dan neraca (SAP:2010).

## 2.2 Aksesibilitas

Aksesibilitas memiliki arti hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Miftahul Reza Fauziyah, 2017:4).

Aksesibilitas merupakan proses pengungkapan laporan keuangan untuk dapat dikonsumsi oleh public (Anies Iqbal Mustofa, 2012:3). Berdasarkan hal tersebut, maka aksesibilitas laporan keuangan terkait kemudahan seseorang untuk mengakses informasi laporan keuangan.

Dalam menentukan keberhasilan aksesibilitas ini terdapat beberapa indikator untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, diantaranya keterbukaan, kemudahan, dan *accessible* (Sumiyati, 2015:6). Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya dengan memenuhi beberapa hal, antara lain : keterbukaan, kemudahan dan *Accesible* (Miftahul Reza Fauziyah, 2017;6).

## 2.3 Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk memberikan bertanggungjawab atas kinerja dan tindakan seseorang yang berbadan hukum kepada pihak yang

memiliki hak dan wewenang untuk memperoleh pertanggungjawaban (Yulianto Astuti, 2014:6). Akuntabilitas juga dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep etika yang berhubungan dengan administrasi publik, seperti lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif yang harus dipertanggungjawabkan, dipertanyakan, dipersalahkan dan memiliki keterkaitan dengan penjelasan aspek dari administrasi pemerintah (Rizal Djalil, 2014:63).

## 2.4 Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas merupakan unsur – unsur yang digunakan dalam mengukur tingkat akuntabilitas laporan keuangan menurut Widodo, Joko (2011:19) : a) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran adalah akuntabilitas lembaga- lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja. b) Akuntabilitas Proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, system informasi manajemen, dan prosedur administrasi.c) akuntabilitas program (*program accountability*) berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. d) Akuntabilitas Kebijakan (*policyaccountability*) yaitu kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jalan Pertanian Bengkalis Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang dilakukan pada tahun 2021. Jenis penelitian ini merupakan penelitian

kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah pegawai kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis sebanyak 30 orang. Sampel yang digunakan adalah sampel jenuh karena semua pegawai terlibat langsung dengan laporan keuangan, sehingga jumlah sampel adalah sebanyak jumlah populasi yaitu 30 orang. Sumber data yang digunakan adalah data primer, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, Teknik analisa data yang digunakan adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### Data Responden

Berdasarkan kuesioner yang disebarakan kepada responden, maka diperoleh data yang berkenaan dengan responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

**Tabel.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	19	63,3
2	Perempuan	11	36,7
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Olahan Peneliti

##### Uji Kualitas Data

Pengujian validitas menggunakan *Corrected Total Correlation* dengan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dan  $r_{tabel}$  pada taraf signifikan 5%. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan suatu instrumen dianggap valid adalah apabila setiap item pertanyaan mempunyai nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dengan nilai  $r_{tabel}$  sebesar 0.3061 pada derajat kebebasan 28. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian validitas dapat ditunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 2. Uji Validitas Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010**

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
X1	30	45	63	57,97	<b>4.271</b>
X2	30	39	54	49,20	<b>3.022</b>
Y	30	73	104	94,37	<b>6.688</b>
Valid N	30				

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Keputusan
Penyajian Laporan Keu (X1)	0.835	Reliabel
Aksesibilitas ( X2)	0.657	Reliabel
Akuntabilitas (Y)	0.763	Reliabel

Sumber : Data Olahan Peneliti 2021

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.46432687
	Most Extreme Differences	.117
Kolmogorov-Smirnov Z	Positive	.078
	Negative	-.117
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.643
		.802

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan Tabel 6. terlihat bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) adalah 0.802. Karena nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0.05 yaitu 0.802 > 0.05 maka model regresi berdistribusi normal.

**Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta
(Constant)	7,269	11,743	590
Penyajian Laporan Keu	.923	.274	-.247
Aksesibilitas	.682	.328	.308

Dependent Variabel: Akuntabilitas  
 Sumber: Output SPSS

Berdasarkan Tabel.5 terlihat bahwa model regresi Linier untuk pengaruh penyajian laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan aksesibilitas terhadap akuntabilitas laporan keuangan dapat dituliskan sebagai :

$$Y = 7.269 + 0.923 X_1 + 0.628 X_2$$

Nilai koefisien dari regresi linear berganda akan menggambarkan pengaruh penyajian laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan aksesibilitas terhadap akuntabilitas keuangan berdasarkan uji regresi, yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a) Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 7.269, dapat diartikan bahwa penyajian laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan aksesibilitas terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 7.269 satuan jika penyajian laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan aksesibilitas bernilai konstan
- b) Nilai koefisien 0.923 pada hasil regresi menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 satuan pada variabel  $X_1$  maka nilai Y akan mengalami kenaikan sebesar 0.923. Artinya, akan terjadi perubahan pengaruh penyajian laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 0.923 satuan.
- c) Nilai koefisien 0.682 pada hasil regresi menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 satuan pada variabel  $X_1$

maka nilai Y akan mengalami kenaikan sebesar 0.682. Artinya, akan terjadi perubahan pengaruh aksesibilitas terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 0.682 satuan. Uji F simultan digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan berdasarkan PP No. 10 Tahun 2010 dan aksesibilitas mempengaruhi variabel dependen yaitu akuntabilitas secara simultan. Pengambilan keputusan pada uji t – parsial berdasarkan nilai  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$  pada taraf signifikan 5% yaitu 2.92. Berikut merupakan hasil uji F Simultan yang dapat dilihat pada Tabel.6

**Tabel 6. ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig
<b>Regression</b>	904.749	2	452.374	31.141	.000 <sup>a</sup>
<b>Residual</b>	392.218	27	14.527		
<b>Total</b>	<b>1296.967</b>	<b>29</b>			

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan Tabel 6. dapat dilihat bahwa nilai Sign adalah 0.000 dan  $F_{hitung} 0.000 < 0.05$  dan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $31.141 > 2.92$  maka  $H_a$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan berdasarkan PP No. 10 Tahun 2010 dan aksesibilitas mempengaruhi variabel akuntabilitas secara simultan,

**Tabel.7. Uji Koefisien Determinan**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Estimate
1	.835 <sup>a</sup>	.698	.675	3.811

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan Tabel.7 terlihat bahwa nilai R Square sebesar 0.698 atau 69.8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan sebesar 69.8% dipengaruhi oleh penyajian laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan aksesibilitas, sedangkan 30.2%

lainnya di pengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini, seperti tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi dan sebagainya. Secara umum akuntabilitas instansi dapat ditunjukkan dari laporan keuangan dan kemudahan mengakses laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan kinerja instansi dan penggunaan program dalam menginput laporan keuangan memudahkan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan tersebut.

### **Pembahasan Analisa Data**

Pada bagian ini menjelaskan tentang hasil analisis data. Pembahasan untuk masing-masing variabel akan disajikan sebagai berikut:

#### **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis. Hasil analisis yang menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3.976 > 2.052$  maka hipotesis diterima sehingga penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan daerah yang baik dan benar serta memenuhi karakteristik laporan keuangan, maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan yang berkualitas dapat menggambarkan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salomi J Hehanussa (2015) yang bahwa Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, laporan keuangan

yang disajikan telah mampu menggambarkan akuntabilitas instansi. Hal ini dibuktikan dengan laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis mendapatkan predikat 10 terbaik sekabupaten Bengkalis.

#### **Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas Keuangan.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis berdasarkan kepada hasil analisis yang ditunjukkan oleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2.079 > 2.052$  Walaupun aksesibilitas dengan indikator terbuka di media massa memberikan kemudahan dalam mengakses dan memberikan ketersediaan informasi/accibel dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan, tetapi hal tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian ini bertentangan penelitian yang dilakukan oleh Dedy Aries Poae dan David P. E Saerang (2013) yang menyatakan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud.

### **5. Kesimpulan dan Saran**

#### **Kesimpulan:**

Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Variabel Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas laporan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis. Hal ini berarti bahwa Penyajian laporan keuangan daerah yang baik dan benar serta memenuhi karakteristik laporan keuangan, maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah. 2) Variabel Aksesibilitas berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas laporan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, ini menunjukkan bahwa Aksesibilitas laporan keuangan dapat menggambarkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan suatu instansi dalam mengakses kinerja instansi yang akuntable.

#### Saran:

1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, khususnya bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis agar selalu berupaya dalam melakukan peningkatan kualitas laporan keuangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menambahkan variabel lainnya yang kemungkinan dapat mempengaruhi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis.

#### Daftar Pustaka

- Ahmad Chairul Wahyu. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Skripsi Akuntansi STIE Bengkalis
- Astuti, Yulianto. (2014). *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 . Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Volume 1 Nomor 1, hal 1 – 14
- Dedy Aries Poae dan David P. E Searang. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitasnya Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal *Accountability Volume 2 No 1*
- Djalil, Rizal. (2014). Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi. Jakarta : PT Semesta Rakyat Merdeka
- Halim, Abdul. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Hehanussa, Solomi. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksestabilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *Conference in Business, Accounting and Maangement (CBAM)*, 2(1):82-89.
- Heri. (2012). Akuntansi Keuangan Menengah Cetakan Kedua. Jakarta : Bumi Aksara
- I Dewa Nyoman Krisna Putra Sanjaya, Edy Sujana dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Akseibilitas Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. (Jurnal Ekonomi Volume 2 No. 1, pp :1-12, 2014),
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Jakarta : Salemba Empat Press
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi Offset
- Miftahul Reza. (2017). Pengaruh Penyajian dan Akseibilitas Laporan keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6 No. 6, pp : 1-16
- Widodo, Joko. (2011). Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik). Malang : Bayu Media
- Yulisa, Rahmah. (2014). Impelementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metofora Amanah di Lembaga